

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

1.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu unsur penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang komprehensif dan juga sebagai pencerminan filsafat serta kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. Sejak saat itu tanggung jawab pemerintah semakin meningkat bagi kesejahteraan sosial warga sekitarnya. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif baru berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sudah lama ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tetapi di negara-negara maju dan negara industri sekarang ini, masalah sosial dirasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang teratur. Kajian utama dari ilmu kesejahteraan sosial adalah keberfungsian sosial.

Kesejahteraan sosial menekankan pada suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2014:1), Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Setiap manusia menginginkan untuk hidup sejahtera, sejahtera menunjukkan pada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, damai dan sehat baik jasmani maupun rohani. Pencapaian suatu kondisi yang sejahtera ini tentu menjadi hal yang bagi sebagian orang sulit untuk menapai kesejahteraan terutama bagi masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang rendah, adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2003: 153) yaitu “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”.

Berdasarkan definisi kesejahteraan sosial menurut Huraerah di atas bahwa kesejahteraan sebagai sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki berbagai masalah sosial serta membantu masyarakat tersebut dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya, sehingga mereka dapat berfungsi sosial dengan baik. Di Indonesia sendiri kesejahteraan sosial masyarakatnya belum merata dengan baik disetiap wilayahnya, sehingga hal ini perlunya gerakan dari pemerintah, kalangan masyarakat serta para pekerja sosial dalam membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang kerap terjadi.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No.06 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, pasal 2 ayat 1 adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material manual spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan , kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azazi serta kewajiban manusia dengan falsafah kita yaitu, Pancasila.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 bahwa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kepedulian, kemampuan dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan keberlangsungan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan anak, kesehatan dan hak untuk ikut berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Penjelasan yang kedua adalah mengembalikan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat, yang sebelumnya mempunyai masalah sosial. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut bisa dicegah dan ditangani. Penjelasan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan kepedulian kepada orang-orang yang mempunyai masalah sosial untuk ditangani. Penjelasan

yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

1.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial ini guna mendorong masyarakat dalam mencapai suatu kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Tujuan ini juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sudah atau akan dicapai oleh masing-masing individu meliputi perubahan fisik, mental, ekonomi sosial dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Menurut Fahrudin (2014: 10) menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, msalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

1.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial *negative* akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Friedlander dan Apte , (1982) dalam Fahrudin (2012:12) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut adalah :

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*) kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*curative*) kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*development*) kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*supportive*) fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Empat fungsi dalam kesejahteraan sosial berdasarkan yang dikemukakan oleh Friedlander dan Apte, bahwa fungsi-fungsi yang menunjang kesejahteraan sosial itu untuk membantu masyarakat dalam mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi baik itu ekonomi, sosial maupun dalam pendidikan, sehingga dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut masyarakat sebagai suatu peranan yang dapat meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial.

1.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, yaitu adanya komponen-komponen yang tidak kalah jauh pentingnya. Komponen-komponen tersebut menjadi suatu pembeda antara bidang kesejahteraan sosial dengan bidang lainnya. Dikutip dalam Fahrudin (2012:16) Komponen-komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Formal
Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi atau badan sosial yang formal pula.
2. Pendanaan
Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat.

3. Tuntutan kebutuhan manusia
Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntunan kebutuhan manusia.
4. Profesionalisme
Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial di dalam praktiknya.
5. Kebijakan
Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.
6. Peran serta masyarakat
Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.
7. Data dan informasi kesejahteraan sosial
Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini kegiatan kesejahteraan sosial yang sudah di sampaikan di atas menyatakan bahwa kegiatan kesejahteraan sosial mempunyai tujuan untuk mensejahterakan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam hidupnya dan menciptakan hidup yang layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak. Untuk mencapai kehidupan yang layak kegiatan kesejahteraan sosial didukung oleh organisasi formal, pendanaan, tuntutan kebutuhan manusia, profesionalisme, kebijakan/ perangkat hukum/ perundang-undangan, peran serta masyarakat, data dan informasi kesejahteraan sosial.

1.2 Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

2.2.1 Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Suharto (2010:4) mendefinisikan usaha

kesejahteraan sosial yaitu: “Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, menegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, usaha kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan-kegiatan yang secara kongkret (nyata) untuk berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan kepada individu-individu, keluarga, kelompok maupun komunitas.

Pengertian mengenai usaha kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No.6 tahun 1974 yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1987:39) bahwa: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua program, upaya dan kegiatan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan keajahteraan sosial ini sebagai suatu program yang sengaja dibuat untuk memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat berupa kegiatan untuk pengembangan kesejahteraan sosial yang mencakup individu, kelompok maupun komunitas agar mereka dapat mencapai suatu kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga taraf kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik.

2.2.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi untuk meningkatkan derajat hidup manusia, apabila usaha kesejahteraan sosial ini dapat berjalan baik dengan

adanya kerja sama dari pemerintah, pihak swasta dan dunia usaha, karena usaha kesejahteraan sosial ini sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang dapat terlibat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Suharto (2010:4), tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan standar hidup
- b. Peningkatan keberdayaan
- c. Penyempurnaan kebebasan

Adapun penjelasan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemausiaan.

2.2.3 Jenis-Jenis Usaha Kesejahteraan Sosial

Jenis-jenis dalam usaha kesejahteraan sosial berupa pelayanan-pelayanan yang dapat membantu individu, kelompok maupun komunitas ini untuk perubahan

kondisi menjadi sejahtera, adapun jenis usaha kesejahteraan sosial yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Fahrudin (2012:18) bahwa:

1. Layanan yang langsung ditujukan ke kelompok atau komunitas sasaran yang dikenal dengan nama *Direct Services*. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat mengembangkan program pengembangan modal usaha dan berbagai macam model pemberian bantuan keuangan untuk komunitas (*income generating activities*), program beasiswa untuk anak yang tidak mampu dan sebagainya. Di sini semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditujukan langsung kepada komunitas masyarakat.
2. Adalah layanan yang tidak langsung diarahkan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program langsung ke komunitas sasaran. Bentuk pelayanan ini dikenal dengan *Indirect Services*, misalnya suatu lembaga donor internasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) maka lembaga tersebut mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (*human services organization*).

Berdasarkan jenis-jenis usaha kesejahteraan sosial bahwa pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat yang masih rentan terhadap masalah sosial, guna membantu mereka untuk dapat mencapai tujuan dengan memperbaiki dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dalam melakukan perubahan di masyarakat, organisasi pelayanan sosial kepada masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada komunitas sasaran.

1.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya sendiri. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Khan (Fahrudin, 2012:51) adalah:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang telah di sediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan

Pelayanan sosial di atas bahwa layanan-layanan yang diberikan dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak selalu dilaksanakan oleh pekerja sosial, melainkan juga bagi tenaga-tenaga profesional yang lain namun dengan maksud dan tujuan yang sama untuk mencapai suatu keadaan yang sejahtera, sehingga para tenaga-tenaga profesional lain juga dapat memberikan pelayanan-pelayanan sosial. Lembaga-lembaga lain juga dapat ikut serta memberikan pelayanan sosial dengan tujuan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kualitas, taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang berkaitan dengan mengembalikan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kemampuan masing-masing individu, kepedulian dan rasa tanggung jawab.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat seluruhnya guna melakukan perubahan fisik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pelayanan sosial ini cenderung diberikan kepada individu-individu, keluarga maupun komunitas yang masih belum beruntung dalam pemberian pelayanan sosial, sehingga perlunya diberikan pertolongan dalam mencapai perubahan tersebut. Fungsi pelayanan sosial menurut Richard M. Titmus yang dikutip oleh Wibhawa (2010:52) bahwa:

1. Pelayanan-pelayanan atau bentuk bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga atau kelompok. Baik untuk waktu pendek maupun panjang (*a day care programme*).
2. Pelayanan-pelayanan atau bantuan untuk melindungi masyarakat (*probation*).
3. Pelayanan-pelayanan atau bantuan sebagai suatu investasi di dalam diri manusia untuk pencapaian tujuan-tujuan sosial (*a man power programme*).
4. Pelayanan-pelayanan atau bantuan sebagai kompensasi untuk masalah sosial akibat kesalahan pelayanan.

Fungsi pelayanan sosial berdasarkan yang dikemukakan oleh Richard bahwa pelayanan sosial sebagai bentuk bantuan, yang bertujuan, yang bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bentuk bantuan, yang bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk melindungi dalam berbagai hal seperti tindakan kekerasan, kriminalitas maupun pembunuhan, pelayanan sosial juga untuk membantu masyarakat dalam pencapaian tujuan sosial dalam menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga sosial yang sudah ada apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan sosial.

1.4 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu orang lain, semata-mata ingin membantu orang lain untuk menjadi lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya yang dianggap kurang baik. Pengertian pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* dalam tahun 1959 dalam Fahrudin (2012:59) dinyatakan bahwa:

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial dan pencegahan disfungsi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pekerjaan sosial ini ingin membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, sehingga hubungan sosial mereka saling terjalin dengan baik di dalam lingkungan tempat individu itu berada, Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial ini guna membantu individu untuk menciptakan suatu hubungan sosial yang baru, dimana hubungan yang sebelumnya terganggu baik itu karena kurangnya interaksi satu sama lain maupun faktor lainnya yang menjadikan hubungan tersebut menjadi renggang serta untuk menghindari berbagai macam kondisi-kondisi yang berkaitan dengan disfungsi sosial, seperti di dalam suatu keluarga dimana seorang ayah yang harusnya menari nafkah namun justru menjadi pengangguran karena kurangnya skill yang dimilikinya.

Pekerjaan sosial yang memiliki kemampuan untuk membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah menjadikan tugas sebagai pekerjaan sosial bertambah berat, namun dengan kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan seorang pekerja sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pengertian pekerjaan sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011: 39) bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara orang lain dan lingkungan sosialnya untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai suatu kesatuan harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Soetarso mengemukakan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dengan memberikan bantuan melalui pengembangan-pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

2.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Misi utama profesi pekerja sosial menurut NASW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin. Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian sosial orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam

mesyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat.

Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktek pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menhubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki ke efektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Zastrow,2008)

Berdasarkan penjelasan pertama adalah pekerja sosial harus bisa membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Penjelasan yang kedua pekerja sosial membantu menghubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya. Penjelasan yang ketiga adalah pekerja sosial menyampaikan masukan-masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki ke efektifan pelayanan tersebut. Penjelasan keempat adalah pekerja sosial membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial, baik itu kebijakan pemerintah dan kebijaka pelayanan lembaga. Selain keempat tujuan itu diatas, Zastrow (2008) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi

7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Menurut CSWE bahwa tujuan praktek pekerjaan sosial tidak cukup hanya empat tujuan tetapi juga perlunya pengembangan dari seorang pekerjaan sosial itu sendiri untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan dalam praktek pekerjaan sosial dalam menangani berbagai macam kasus-kasus yang dialami kliennya. Sehingga pekerjaan sosial juga memiliki kualitas yang baik untuk meningkatkan kualitas orang lain dalam mencapai suatu kondisi yang sejahtera.

2.4.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah bentuk pelayanan secara profesional yang diberikan pekerja sosial untuk membantu individu-individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga keberfungsian sosial mereka dapat kembali berfungsi dengan baik. Tugas-tugas yang diemban oleh pekerjaan sosial ini yang membedakan seorang pekerjaan sosial dengan profesinya lainnya. Pekerjaan sosial yang profesional memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai macam disiplin ilmu serta tujuan pekerjaan sosial untuk menolong individu dalam mengembalikan keberfungsian sosial inilah yang sangat membedakan profesi dari pekerjaan sosial. Menurut Iskandar (2013:30) fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
- b. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu maupun kelompok.
2. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial.
3. Mencegah timbulnya kesengsaraan dan mengatasi kemelaratan individu.
4. Melindungi individu maupun keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya.

Menurut Iskandar bahwa fungsi di dalam praktek pekerja sosial ini guna mengembangkan dan menjamin kesejahteraan sosial bagi individu maupun kelompok. Fungsi-fungsi tersebut perlu diterapkan oleh pekerjaan sosial agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat pekerjaan sosial melaksanakan tugas-tugas profesinya, sehingga tujuan dan fungsi dari pekerjaan sosial dapat terlaksana dengan baik dan fokus pekerjaan sosial dalam membantu individu dan kelompokpun dapat tercapai. Fungsi lain tentang pekerja sosial juga dikemukakan oleh Sukoco (1995:20) bahwa:

- a. Membantu untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial.
- e. Pemeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

Fungsi pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Sukoco menyangkut lima hal, dimana pekerja sosial ini memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masing-masing individu guna meningkatkan kemampuan yang mereka miliki untuk memecahkan masalah yang mereka alami, membantu mereka dalam hal berinteraksi sosial dengan sistem sumber seperti pemerintah desa atau kabupaten, lembaga-lembaga sosial yang memberikan berbagai macam pelayanan serta para pemilik dunia usaha untuk dapat bekerja sama dalam hal meningkatkan kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan agar pemerataan pembangunan baik itu ekonomi maupun sosial dapat tersebar diberbagai daerah secara merata.

2.4.4 Peran Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai seorang pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsia sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995:22-27) bahwa:

- a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)
Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
- b. Peran sebagai perantara (*broker*)
Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan emberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*educator*)
Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*expert*)
Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat)
- e. Perencanaan sosial (*social planer*)
Seorang perencana sosial mengumpulkan dan mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisi dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Sukoco tentang peran-peran pekerja sosial yang terdiri dari tujuh peranan yang seluruhnya harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan pertolongan kepada individu, kelompok maupun masyarakat guna memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan membantu mereka agar dapat hidup secara mandiri. Seiring dengan tujuh peranan yang harus diemban oleh pekerja sosial, tentu hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan juga perlunya koordinasi antara pekerja sosial dengan pemerintah, dinas sosial, lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat mencapai tujuan mereka serta meringankan beban dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

1.5 Tinjauan Tentang Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial orang, kelompok dan masyarakat, menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012:62) keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka.

Karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan, karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial setiap orang diminta melakukannya.

Penjelasan di atas merupakan peranan-peranan individu, kelompok dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan. Menurut Suharto (2005:27) kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

1.6 Tinjauan Tentang Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi pmasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh pekerja sosial sebagai berikut:

1. Social Case Work (Bimbingan Sosial Perorangan)

Bimbingan sosial perorangan menurut Linton B. Swift yang dikutip oleh Syarif Muhudin (1992) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang pekerja sosial harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja sosial dengan klien. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

- a. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
- b. Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
- c. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda dengan individu yang satu dengan individu lainnya.
- d. Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
- e. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
- f. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

2. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial

kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok menurut Harleigh B.Tacier yang dikutip oleh Syarif Muhidin (1992:11) menyatakan bahwa:

“Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu kelompok dari lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja sosial atau petugas yang membimbing interaksi didalam program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri dengan satu yang lain dan kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.”

Berdasarkan definisi di atas individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahannya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah:

- a. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
- b. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
- c. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.

- d. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
- e. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
- f. Penggalan sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

3. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah supaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

1.7 Tinjauan Tentang Persepsi

2.7.1 Definisi Persepsi

Persepsi merupakan suatu pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh setiap manusia karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda sehingga memiliki pemikiran yang berbeda pula sesuai dengan apa yang dialami. Persepsi menurut Rakhmat (2012:50) adalah sebagai berikut:

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*)

Definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah gambaran atau pandangan terhadap suatu objek atau peristiwa, pandangan setiap orang bisa berbeda tergantung pada apa yang dialami setiap orang dalam kehidupannya, seseorang mencari objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Pengalaman dan ingatan, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian dalam kehidupannya.

Adapun pengertian persepsi menurut Rivai (2003:231) yang menyatakan bahwa “Peristiwa adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera agar memberikan makna bagi lingkungan”. Definisi lain mengenai persepsi menurut Sarwono (2013:86) mengartikan “Persepsi sebagai kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan objek dan menginterpretasikan”.

Dari defisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan individu dalam menafsirkan dan memberikan makna bagi objek yang diinderanya. Secara keseluruhan, berdasarkan uraian mengenai pengertian persepsi dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses merupakan proses individu dalam memahami objek dan peristiwa yang terjadi di lingkungan, sehingga menjadi sesuatu yang berarti. Hasil persepsi akan berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan ini dikarenakan perasaan, kemampuan berpikir dan pengalaman-pengalaman individu yang tak sama.

2.7.2 Hal-hal Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi

Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cara kita mempersepsikan situasi sekarang tidak bisa terlepas dari adanya pengalaman terdahulu. Jika pengalaman terdahulu itu seringkali muncul, maka reaksi kita akan menjadi terbiasa.

Berikut dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan (*knowledge*), harapan (*expectations*) dan penilaian (*evaluation*). Menurut Sarwono (2013:43) perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perhatian

Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

2. Set

Harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.

3. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4. Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam satu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.

5. Ciri kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi juga persepsi.

6. Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individu jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

Setiap manusia tentunya memiliki pemikiran dan juga karakteristik yang berbeda, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan suatu hal yang unik yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu manusia memiliki pemikiran atau pandangan dari setiap pengalamannya yaitu apa yang pernah dilakukannya.

2.7.3 Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Persepsi

Di dalam mempersepsikan sesuatu pasti terdapat suatu perbedaan pada setiap manusia, meskipun perbedaan persepsi ini terjadi pada umumnya dapat dijelaskan. Ada beberapa faktor yang berperan dalam persepsi yang dimiliki oleh setiap

manusia. Menurut Walgito (2005:101) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi antara lain:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenal alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera, syarat dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:65) meliputi: pelaku persepsi, target (objek) dan situasi. Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku Persepsi

Apabila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu, diantaranya karakteristik pribadi yang relevan mempengaruhi persepsi meliputi: sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

2. Target

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi persepsi. Gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan dan atribut-atribut lainnya dari target mempengaruhi cara seseorang memandangnya. Target tidak dipandang sebagai sempit, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Semakin besar kemiripan itu, semakin besar pula kecenderungan mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi

Situasi adalah konteks dimana kita melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Faktor situasi yang dapat mempengaruhi persepsi meliputi: waktu, keadaan/tempat dan keadaan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berperan dalam persepsi ialah adanya objek yang dipersepsikan, alat indra, perhatian, pelaku persepsi, target dan situasi. Hal ini terjadi dikarenakan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap suatu objek yang dipersepsinya.

2.7.4 Objek Persepsi

Persepsi dari setiap orang tentunya akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal yang membuat terjadinya perbedaan yaitu karena adanya perbedaan di setiap individu. Objek yang dapat dipersepsi yaitu segala sesuatu yang ada disekitar manusia. Manusia itu sendiri juga dapat menjadi objek persepsi, orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi disebut sebagai persepsi diri atau *self-perception*. Menurut Walgito (2005:108) Objek persepsi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Objek yang non manusia

Persepsi yang berobjekan non manusia, hal ini sering disebut sebagai *non soial perception* atau juga disebut *things perception*.

2. Objek manusia

Objek persepsi yang berwujud manusia ini disebut *person perception* atau ada juga yang menyebutnya sebagai *social perception*.

1.8 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.8.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu strategi pembangunan yang mengandalkan masyarakat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara

mandiri atau tidak ketergantungan dengan sesuatu. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri untuk membuat masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi suatu permasalahan atau memecahkan suatu permasalahan. Hal tersebut serupa dengan yang dikemukakan oleh Subejo dan Narmo (2004) dalam buku Mardikanto dan Soebiato (2017:32), yaitu:

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* yang dapat menimbulkan masyarakat mendapatkan kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial sehingga masyarakat dapat mengelola segala sumberdaya sendiri. Sejalan dengan program Perhutanan Sosial karena dalam program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan.

2.8.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan program Perhutanan Sosial yang di buat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan Soedijanto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:108) yaitu:

1. Kesukarelaan, merupakan keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan.
2. Otonom, merupakan kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu.
3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
4. Parsipatif, yaitu keterlibatan semua *stake holders* dari proses perencanaan hingga evaluasi.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara.
6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua untuk mengemukakan pendapatnya.
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya dan saling mempedulikan.
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
9. Akuntabilitas, yang dapat di pertanggung jawab dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
10. Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom (kota dan kabupaten) untuk mengoptimalkan sumberdaya bagi kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

2.8.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis terhadap masyarakat. Selaras dengan hal itu pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan mutu hidup dari masyarakat. Ada juga tujuan pemberdayaan yang dikemukakan Mardikanto dan Soebiato (2017:111) yaitu:

1. Perbaikan Pendidikan
2. Perbaikan Aksebilitas
3. Perbaikan Tindakan
4. Perbaikan Kelembagaan
5. Perbaikan Usaha
6. Perbaikan Pendapatan
7. Perbaikan Lingkungan
8. Perbaikan Kehidupan
9. Perbaikan Masyarakat

